



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 28  
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TORAJA**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melengkapi persyaratan sarana dan prasarana unit transfusi darah RSUD Lakipadada tipe pratama sehingga sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah maka perlu dilakukan pengadaan beberapa alat sebagai persyaratan Unit Transfusi Darah RSUD Lakipadada tipe pratama yang belum termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 08);
27. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 30); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

**1 . Pendapatan**

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Semula	Rp	160.000.000.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Menjadi	<b>Rp</b>	<b>160.000.000.000,00</b>

**b. Dana Perimbangan**

Semula	Rp	802.437.879.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Menjadi	<b>Rp</b>	<b>802.437.879.000,00</b>

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

Semula	Rp	198.746.893.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Menjadi	<b>Rp</b>	<b>198.746.893.000,00</b>

**Jumlah Pendapatan**

<b>Semula</b>	Rp	1.161.184.772.000,00
<b>Bertambah/Berkurang</b>	Rp	0,00
<b>Menjadi</b>	<b>Rp</b>	<b>1.161.184.772.000,00</b>

**2 . Belanja**

**a. Belanja Tidak Langsung**

**1) Belanja Pegawai**

Semula	Rp	356.620.318.094,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Menjadi	<b>Rp</b>	<b>356.620.318.094,00</b>

**2) Belanja Hibah**

Semula	Rp	7.275.500.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp	(100.000.000,00)
Menjadi	<b>Rp</b>	<b>7.175.500.000,00</b>

3) Belanja bantuan sosial		
Semula	Rp	128.000.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Menjadi	<b>Rp</b>	<b>128.000.000,00</b>

4) Belanja bagi hasil		
Semula	Rp	1.007.500.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Menjadi	<b>Rp</b>	<b>1.007.500.000,00</b>

5) Belanja bantuan keuangan		
Semula	Rp	161.484.285.906,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Menjadi	<b>Rp</b>	<b>161.484.285.906,00</b>

6) Belanja tidak terduga	Rp	1.594.168.000,00
	Rp	(1.190.000.000,00)
	<b>Rp</b>	<b>404.168.000,00</b>

Jumlah Belanja Tidak Langsung		
Semula	Rp	<b>528.109.772.000,00</b>
Bertambah/Berkurang	Rp	<b>(1.290.250.000,00)</b>
Menjadi	<b>Rp</b>	<b>526.819.772.000,00</b>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai		
Semula	Rp	71.801.148.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Menjadi	<b>Rp</b>	<b>71.801.148.000,00</b>

2) Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp	294.489.478.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp	480.000.000,00
Menjadi	<b>Rp</b>	<b>294.969.478.000,00</b>

3) Belanja Modal		
Semula	Rp	298.624.989.600,00
Bertambah/Berkurang	Rp	810.000.000,00

Menjadi	Rp	298.624.9899.600,00
Jumlah Belanja Langsung		
Semula	Rp	664.159.015.600,00
Bertambah/Berkurang	Rp	1.290.000.000,00
Menjadi	Rp	665.449.015.600,00
<b>Jumlah Belanja</b>		
<b>Semula</b>	Rp	1.192.268.787.600,00
<b>Bertambah/Berkurang</b>	Rp	0,00
<b>Menjadi</b>	Rp	1.192.268.787.600,00
<b>Surplus/Defisit</b>	Rp	(31.084.015.600,00)

**3 • Pembiayaan**

1) Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp	31.084.015.600,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Menjadi	Rp	31.084.015.600,00
2) Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp	5.000.000.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Menjadi	Rp	5.000.000.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>		
<b>Semula</b>	Rp	31.084.015.600,00
<b>Bertambah/Berkurang</b>	Rp	0,00
<b>Menjadi</b>	Rp	31.084.015.600,00
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran</b>	Rp	0,00

2. Lampiran I dan Lampiran II, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

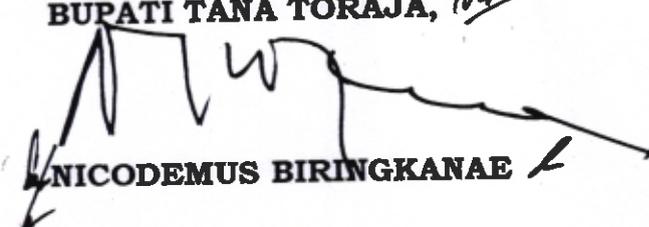
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal, 17 JULI 2018

**BUPATI TANA TORAJA,** 

  
**NICODEMUS BIRINGKANA E** 

Diundangkan di Makale  
pada tanggal, 17 JULI 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,**

  
**SEMUEL TANDE BURA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 20